

Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lam

by Dr. Hudaidah, M.pd

Submission date: 17-Jun-2023 01:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 2117696137

File name: b6c0cc79f41637b7b604eb3f88cb27ab.pdf (236.7K)

Word count: 4245

Character count: 27256



Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021 Halm 569 - 577

EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN

Research & Learning in Education

<https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>



Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama

Salsabiil Rihhadatul Aisy^{1✉}, Hudaidah²

Universitas Sriwijaya, Indonesia^{1,2}

E-mail : Salsabiilrihhadatul.9e@gmail.com¹, Hudaidah@fkip.unsri.ac.id²

Abstrak

Pada artikel ini membahas pendidikan Indonesia pada era awal kemerdekaan sampai orde lama pada periode 1945-1966. Penelitian ini akan membahas sistem pendidikan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan, arah kebijakan pendidikan, dan berbagai hambatan serta masalah yang timbul dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dan juga disini akan menyajikan bagaimana perkembangan kurikulum dan sitem persekolahan pada awal kemerdekaan sampai berakhirnya Orde Lama. Pada penelitian ini menggunakan metode sejarah (metode historis) proses tahapannya yaitu: Heuristik, kritik (intern dan ekstern),interpretasi dan historiografi. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas pendidikan di Indonesia pada era orde lama yang diminta bisa menentuka tujuan pada pendidikan Indonesia ke arah yang lebih maju dan juga jelas. Jika tujuan pendidikan di Indonesia sudah jelas maka pemerintah bisa mengarahkan kepada pencapaian strategi yang dibutuhkan .Setelah kemerdekaan pendidikan di Indonesia mengeluarkan kebijakan berasaskan pada pancasila dan UUD 1945,menurut pasal 31 UUD 1945 disini menjelaskan hal yang mengatur mengenai sistem pendidikan nasional. Dan diikuti oleh UU pada tahun-tahun selanjutnya.

Kata Kunci: Sistem, Pendidikan, Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama, Kurikulum.

Abstract

This article discusses Indonesian education in the early independence days until the old order in the 1945-1966 period. This research discusses the education system in Indonesia in the early independence days, the direction of education policy, and the various obstacles and problems that arouse in the education system in Indonesia. It also presents how the development of the school curriculum and system at the beginning of independence until the end of the Old Order. In this study, the historical method uses the process of the stages, namely: Heuristics, criticism (internal and external), interpretation and historiography. The results of this study which discuss education in Indonesia in the old order era as investigated to set goals for Indonesian education in a more advanced and clear direction. If the objectives of education in Indonesia are clear, then the government can direct it to the achievement of the required strategy. After independence of education in Indonesia issued policies based on Pancasila and the 1945 Constitution, according to Article 31 of the 1945 Constitution, it explains what regulates the national education system and followed by the law in the following years.

Keywords: Education, System, Early Independence Until the Old Order, Curriculum.

Copyright (c) 2021 Salsabiil Rihhadatul Aisy, Hudaidah

✉ Corresponding author

Email : Salsabiilrihhadatul.9e@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.327>

ISSN 2656-8063 (Media Cetak)

ISSN 2656-8071 (Media Online)

Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 2 Tahun 2021

p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071

PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari proklamasi Indonesia yang dimana saat itu adalah awal perkembangan pemerintahan bangsa Indonesia. Yang dimana hari proklamasi adalah hal yang sangat penting dan bersejarah bagi Indonesia. Sebagai negara yang sudah merdeka sudah seharusnya Indonesia menyusun sistem kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dari sistem yang disusun terdapat sistem pendidikan yang juga diinginkan oleh bangsa Indonesia untuk seluruh rakyat. Setelah Kemerdekaan, Indonesia melakukan perubahan dari berbagai bidang salah satunya pendidikan. Perubahan pada bidang pendidikan merupakan dasar dan harapan bangsa yang merdeka. Sehingga dengan melihat harapan bangsa Indonesia, bidang pendidikan mengalami perubahan. Terutama pada landasan filosofi pendidikan, tujuan pendidikan, sistem pendidikan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Tujuannya agar semua rakyat Indonesia dapat merasakan dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi.

Lalu dilihat bahwa pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia, seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang dijadikan landasan utama pendidikan Indonesia. Meskipun dalam waktu yang singkat, kurang lebih 1945-1950 dan pada 1950-1966 negara Indonesia telah menghadapi beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar. Meskipun begitu dasar falsafah negara tidak terjadi perubahan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan memiliki falsafah pancasila dan landasan Konstitusi berupa UUD 1945. Pada pasal 31 UUD 1945, yang berbunyi 1) Tiap warga berhak mendapat pengajaran, 2) Pemerintah mengusahakan sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UU. Landasan dasar negara ini digunakan untuk menyusun dan melaksanakan sistem pendidikan nasional.

Dan juga pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pendidikan nasional yang berlandaskan pada budaya bangsa sendiri. Tujuan pendidikan nasional yaitu untuk menciptakan warga negara yang sosial, demokratis, dan bertanggung jawab serta bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Ruang lingkup pendidikan sendiri tidak bisa dilepaskan dari lingkungan, baik lingkungan sosial, politik, ekonomi maupun lingkungan lainnya.

Berdasarkan kajian diatas, telah membahas sedikit sistem serta peraturan berdasarkan UUD dan pancasila tentang pendidikan. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan lebih lanjut tentang sistem pendidikan dan kurikulum pada masa Kemerdekaan sampai Orde Lama, hal ini dilihat Periode 1945-1950 dan Periode 1950-1966.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode sejarah (metode historis). Dan proses tahapan kerjanya meliputi: Pertama, Heuristik dan kritik (intern dan ekstem) yang dimana hal ini merupakan proses pengumpulan sumber-sumber data untuk kajian pendidikan di era kemerdekaan dan orde lama. Lalu data yang diperoleh dalam bentuk tulisan ataupun lisan dilakukan proses kritik untuk melihat apakah data yang diperoleh cocok dan dipercaya serta otensitas yang terdapat pada materi itu jelas dan berkualitas. Kedua,interpretasi merupakan penafsiran sumber agar memperoleh fakta sejarah yang diambil sehingga dipercaya kebenaran sumbernya. Dan terakhir historiografi, merupakan sistem penulisan serta penyusunan sistematis pada sistem pendidikan di awal kemerdekaan dan orde lama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awal kemerdekaan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pembelajaran di sekolah-sekolah lebih ditekankan pada semangat nasionalisme dan membela tanah air menurut Tim Uny (Fadli & Kumalasari, 2019). Proklamasi merupakan peristiwa yang luar biasa dimana hal ini membuat bangsa ini tidak dijajah lagi dan menimbulkan hidup baru dibidang apa saja salah satunya pada bidang pendidikan, perlu mencoba untuk mengubah sistem pendidikan yang dimana sesuai dengan suasana baru menurut Ahmadi (Fadli & Kumalasari, 2019). Oleh karena itu ada usaha perencanaan pada pendidikan serta pengajaran yang sudah dipersiapkan di hari-hari terakhir penjajahan Jepang menjadikan modal dalam pedoman pertama dilapangan pendidikan. Pendidikan masa awal kemerdekaan berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafah negara menurut Somarsono Moestoko (Fadli & Kumalasari, 2019).

Pada sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak di Proklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidaklah mudah dilalui untuk sampai sekarang. Oleh karena itu, sejarah pendidikan Indonesia di era Orde Lama dapat diantaranya periode 1945-1950 dan Periode 1950-1966. Sekarang akan dibahas tentang sistem pendidikan pada periode tersebut.

A. Pendidikan Masa Kemerdekaan (1945-1950)

Mohammad Yamin sebagai menteri pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, pada masa itu memberikan penjelasan diposisi pendidikan sebagai landasa pembangunan masyarakat Indonesia secara nasionalisme, yang artinya pendidikan itu harus mengangkat tata nilai sosial yang dijadikan identitas bangsa dengan corak tradisi, agama, budaya, bahasa, ras, dan sukunya yang beragam untuk menggantikan sistem pendidikan pada warisan kolonial. Secara garis besar, pendidikan nasional ialah bentuk reaksi pada sistem pendidikan yang dimana bersifat deskriptif serta elitis. Karena itu tujuan pendidikan nasional adalah membentuk masyarakat yang demokratis. (Syaharuddin & Susanto, 2019).

Pada zaman kemerdekaan kondisi sosial politik sangatlah tidak stabil. Maka dari itu hal tersebut sangat mempengaruhi pola dan dinamika pendidikan nasional saat itu, dan telah terjadi beberapa kali perubahan arah dan orientasi pendidikan nasional. Pada Tanggal 1 maret 1946, tujuan pendidikan berorientasi untuk usaha dalam menanamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh yang dimaksudkan untuk menghasilkan patriot-patriot bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. 139 Undang- undang No. 4 tahun 1950 pasal 3, tujuan pendidikan nasional berubah yaitu dengan adanya perumusan tujuan pendidikan dan pengajaran. (Syaharuddin & Susanto, 2019).

Di tanggal 25 November 1945, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mempunyai asas-asas perjuangan sebagai berikut : 1. mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, 2. mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasardasar kerakyatan, 3. membela hak serta nasib para buruh pada umumnya dan juga guru pada khususnya.

Dengan dicantumkan asas pertama, yaitu “Mempertahankan serta menyempurnakan Republik Indonesia, PGRI memiliki tujuan pertama-tama untuk lebih memprioritaskan perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dibanding kepentingan – kepentingan lain sehingga dengan demikian partisipasi guru dalam melaksanakan pengabdian dan perjuangan kemerdekaan tidak sedikit”. Bisa disimpulkan bahwa usaha-usaha yang pernah dilakukan pemerintah berkaitan dengan pendidikan pada tahun 1945-1950 adalah seputar bangunan sekolah, guru, kurikulum, sistem kerja, serta biaya. Berkaitan dengan keperluan bangunan sekolah, tindakan utama adalah merenovasi bangunan rusak atau hancur lebur akibat revolusi fisik atau bangunan tersebut dipakai oleh pemerintah. Langkah Yang dibuat oleh pemerintah adalah sebagai berikut: 1. Mendirikan gedung-gedung untuk sekolah baru tetapi hal itu tidak mencukupi kebutuhan. 2. Menggunakan perumahan-perumahan rakyat/swasta yang memadai untuk dijadikan bangunan

sekolah, dan 3. Menyelenggarakan proses mengajar sebanyak dua kali sehari yang berarti bahwa dalam satu bangunan sekolah dipergunakan oleh dua sekolah.

Selain usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi usaha kekurangan bangunan sekolah tersebut, juga tidak kekurangan partisipasi masyarakat yang bergotong royong membangun bangunan sekolah dengan peralatannya dan yang kemudian disumbangkan kepada pemerintah. Hal ini juga merupakan suatu cara yang bertujuan hendak membentuk kelas masyarakat dan dengan harapan pelajaran di sekolah akan disesuaikan dengan keadaan masyarakat pada waktu itu.

Pendidikan di Indonesia antara tahun 1945- 1950 merupakan pendidikan masa perjuangan. Ciri – ciri utama pada masa periode ini ialah terdapat semacam dualisme dalam pendidikan. Ketika salah satu pihak pendidikan dan pengajaran berlangsung di beberapa daerah negara federal yang dikuasai atau dalam pengaruh Belanda, sedangkan yang dipihak lain langsung dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sistem persekolahan dan Kurikulum Pendidikan di era awal kemerdekaan

Sistem susunan disekolah setelah Indonesia merdeka berdasarkan tingkat pendidikan seperti di masa Jepang tetap diteruskan, sedangkan pelajaran tetap sama dan bahasa pengantar yang telah ditetapkan ialah bahasa Indonesia. Buku-buku pelajaran yang digunakan adalah merupakan buku terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dibuat pada masa Jepang.

Dibawah ini merupakan susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku sejak tahun 1945-1950 yaitu:

Pendidikan Rendah

Dimulai dari pendidikan yang rendah di Indonesia dimulai pada awal kemerdekaan disebut dengan Sekolah Rakyat (SR) masa pendidikannya awalnya 3 tahun menjadi 6 tahun. Yang dimana kurikulum SR diatur sesuai dengan keputusan Menteri PKK pada tanggal 19 November 1946 No. 1153/Bhg A yang menetapkan daftar pelajaran sekolah rakyat dimana penekanannya di pelajaran bahasa dan berhitung. Hal ini dapat dilihat dari 38 jam pelajaran seminggu, 8 jam digunakan untuk bahasa Indonesia, 4 jam digunakan untuk bahasa daerah dan 17 jam digunakan untuk berhitung untuk kelas IV, V dan VI.

Pendidikan Guru

Pada periode diantara tahun 1945-1950 dikenal tiga jenis pendidikan guru yaitu:

Sekolah Guru B (SGB), masa pendidikan 4 tahun serta tujuan pendidikan guru adalah untuk sekolah rakyat. Dan murid yang diterima adalah tamatan sekolah rakyat yang lulus dalam ujian akan masuk kesekolah lanjutan. Pelajaran yang diberikan kepada murid bersifat umum dimulai dari kelas I,II,III sedangkan pendidikan keguruan baru diberikan di kelas IV.

Sekolah Guru C (SGC), dikarenakan kebutuhan guru disekolah rakyat sangat mendesak maka perlu melakukan pembukaan sekolah guru yang dalam waktu singkat. Dan didirikan sekolah guru selama dua tahun setelah sekolah rakyat dan lebih dikenal dengan sebutan SGC tetapi dirasa kurang bermanfaat kemudian ditutup kembali dan diantaranya dijadikan SGB.

Sekolah guru A (SGA), karena ada yang beranggapan bahwa pendidikan guru 4 selama tahun belum menjamin pengetahuan yang cukup untuk tingkat pendidikan guru, maka dari itu dibukalah SGA yang memberi pendidikan tiga tahun sesudah SMP. Mata pelajaran yang didapat di SGA sama dengan mata pelajaran yang didapat di SGB hanya penjabarannya lebih luas dan mendalam.

Pendidikan Umum

Terdapat dua jenis pendidikan Umum yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah Menengah Tinggi (SMT).

Sekolah Menengah Pertama (SMP), sama seperti di zaman Jepang, juga SMP menggunakan sistem pelajaran yang sama, tapi setelah dikeluarnya surat keputusan oleh menteri PPK, maka dibuatlah pembagian A dan B dimulai dari kelas II sehingga didapat kelas IIA, IIB, IIIA dan IIIB. Pada bagian A diberikan setidaknya sedikit ilmu alam dan ilmu pasti. Tetapi lebih banyak diberikan pelajaran bahasa dan praktek administrasi dan B sebaliknya.

Sekolah Menengah Tinggi (SMT), SMT merupakan pendidikan dengan masa tiga tahun setelah SMP dan sesudah lulus dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Berikut merupakan rencana pembelajaran yang berlaku yaitu: (1) isinya memenuhi kebutuhan nasional, (2) bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar, (3) mutu yang tingkatannya sama dengan SMT menjelang kemerdekaan.

Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan: Pendidikan ekonomi, masa pendidikannya tiga tahun sesudah Sekolah Rakyat. Yang dimana sekolah dagang ini memiliki tujuan agar bisa memenuhi kebutuhan tenaga administrasi. Pendidikan Kewanitaan, sesudah kemerdekaan pemerintah akhirnya membuka Sekolah Kepandaian Putri (SKP) dan pada tahun 1947 sekolah guru kepandaian putri (SGKP) masa pelajara yang di tempuh empat tahun setelah SMP.

Pendidikan Teknik

Seperti sekolah lain, keadaan Sekolah Teknik tidaklah teratur karena disamping pelajarannya sering terlibat dalam pertahanan negara, sekolah tersebut kadang-kadang juga dipakai sebagai pabrik senjata. Adapun sekolah-sekolah teknik yang ada pada masa itu ialah:

Yang pertama Kursus Kerajinan Negeri (KKN), bertujuan mendapatkan tenaga tukang yang terampil tetapi disertai dengan pengetahuan teori. Kedua Sekolah Teknik (ST), bertujuan mendidik tenaga-tenaga pengawasan bangunan. Ketiga Sekolah Teknik menengah (STM), bertujuan mendidik tenaga ahli teknik dan pejabat-pejabat teknik menengah. Keempat Pendidikan guru untuk sekolah-sekolah teknik, bertujuan untuk memenuhi keperluan guru-guru sekolah teknik. Kelima Ijazah A Teknik (KGSTP), guna mengajar dengan wewenang penuh pada STP dalam jurusan: bangunan sipil, mesin, listrik dan mencetak. Keenam Ijazah B I Teknik (KGST), untuk mengajar dengan wewenang penuh pada ST/STM kelas I dalam jurusan bangunan sipil, bangunan gedung-gedung dan mesin. Dan yang terakhir Ijazah B II Teknik, guna mengajar dengan wewenang penuh pada STM dalam jurusan bangunan sipil, bangunan gedung, mesin dan listrik.

Pendidikan Tinggi

Merupakan sekolah program lanjutan. Setelah bersekolah di pendidikan kejuruan atau teknik bisa memperdalam ilmu pada bidang masing-masing, dan bisa menyalurkan ilmu tersebut.

Pendidikan Tinggi Republik

Perkembangan pendidikan tinggi sesudah proklamasi kendati mengalami berbagai tantangan, tetapi tidak juga dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan salah satu kekuatan dari seluruh kekuatan rakyat Indonesia. Ketika awal kemerdekaan di Jakarta pada waktu itu merupakan daerah pendudukan Belanda, berdiri sekolah Tinggi kedokteran sebagai kelanjutan Ika Daigaku zaman Jepang. Pada bulan November 1946 dibuka pula Sekolah Tinggi Hukum serta filsafat dan sastra. Setelah aksi agresi militer I kedua lembaga pendidikan tinggi terakhir ini ditutup oleh Belanda sehingga sudah tidak ada lagi, dengan demikian pendidikan tinggi waktu itu terpecah menjadi dua yaitu pendidikan tinggi republik dan Pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda.

Pendidikan Berbasis Agama

Penyelenggaraan pendidikan agama di Indonesia awalnya ialah madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat biasa yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.

Lalu untuk mengembangkan pendidikan agama Islam di sekolah rakyat mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendirisendiri di masing-masing daerah. Pada bulan Desember 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua menteri yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat = Sekolah Dasar) sampai kelas VI.

B. Pendidikan Masa Orde Lama (1950-1966)

Secara umum pendidikan orde lama sebagai wujud setalah kemerdekaan, di bawah kekuasaan Soekarno yang dimana hal ini memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme ini menjadi petunjuk dasar bagaimana pendidikan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Dan secara kuantitatif pendidikan di Indonesia mengalami perubahan.

Sesudah KMB tepatnya pada 1949 terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Di dalam RIS ini menyusun pendidikan dan pengajaran. Pada UUD RIS diatur juga tentang pendidikan nasional. Kebijakan yang dimiliki pendidikan nasional pada masa ini dimulai pada pasal 30 UUDS 1950 RI, yaitu 1). Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, 2). Memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas, 3). Mengajar adalah bebas, dan tidak berkurangnya pengawasan penguasa yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan UU menurut Rifa'i (dalam Fadli & Kumalasari, 2019).

Menurut keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1965 dalam melakukan perumusan bertujuan agar pendidikan nasional Indonesia sesuai dengan Manipol-Usdek, yaitu "Tujuan pendidikan nasional, baik yang dilakukan dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta, serta dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi agar menciptakan warga negara sosialis Indonesia yang susila dan bertanggung jawab atas diselenggarakannya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur dari spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila".

Posisi Siswa sebagai Subjek dalam Kurikulum Orde Lama

Kurikulum di era Orde Lama terbagi menjadi 3 kurikulum yaitu:

Dari Tahun 1945-1968

Ini adalah kurikulum pertama yang digunakan pada masa kemerdekaan dan istilah dalam bahasa Belanda yaitu "*leer plan*" artinya rencana pelajaran. Pada arah pendidikan ini lebih bersifat politis, dari penyesuaian pendidikan Belanda pada kepentingan nasional. Sedangkan, Pancasila ditetapkan sebagai dasar pendidikan. Kurikulum yang dijalankan saat itu diingat sebagai julukan "Rencana Pelajaran 1947", yang baru dilakukan di tahun 1950. Pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, merupakan hal yang diutamakan pada kurikulum ini.

Rencana Pelajaran Terurai 1952

Pada kurikulum ini merangkum setiap mata pelajaran yang dijuluki "Rencana Pelajaran Terurai 1952". Pada kurikulum ini siswa berperan sebagai objek dikarenakan guru menjadi subjek utama dalam memberikan ilmu pengetahuan. Serta guru yang mengatur apa saja yang akan didapat siswa di kelas. Dan guru juga yang keberhasilan siswa pada sistem pendidikan.

Kurikulum 1964

Pada era transisi yang begitu singkat dari RIS menjadi RI membuat pemerintah melakukan pendidikan dan pengajaran menyeluruh yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Pemerintah RI telah mulai dilaksanakan sistem pendidikan yang direncanakan dan berlaku secara nasional dengan semua kualitas yang terbatas.

Pada piagam ini ada hubungan khusus dengan pengurus pendidikan. Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI mengeluarkan "Pengumuman Bersama yaitu di tanggal 30 Juni 1950 dengan tujuan untuk sementara tahun ajaran 1950/1951 sistem belajar mengajar yang berlaku di seluruh Indonesia hingga teknik itu diperiksa kembali. Berikut isi pengumuman semmentaranya yaitu:

Mengenai Susunan Sekolah-Sekolah Negeri

Sekolah-Sekolah Partikelir terdapat beberapa susunan yaitu: Pertama pemerintah mengenal warga negara dan orang asing. Kedua bagi semua warga negara melaksanakan pendidikan sekolah negeri berdasarkan UU dengan mencermati sewajarnya kepentingan khusus mereka yaitu yang mengenal bahasa rumah. Ketiga bagi warga asing tidak dibangun sekolah negeri, tapi diberi peluang untuk bersekolah sesuai kebutuhannya. Keempat kemungkinan sekolah asing bangsa belanda untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah berdasarkan syarat yaitu: " Selama 2 tahun setelah 27-12-1949 paling tidak kepada Sekolah Rendah diberikan bantuan yaitu tenaga guru yang banyak. Kelima sekolah-sekolah partikelir yang mengikuti rencana pelajaran pemerintah mendapatkan subsidi berdasarkan peraturan negeri. Kelima semua sekolah partikelir harus menggunakan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajarannya. Dan terakhir pemerintah mengawasi semua sekolah partikelir.

Organisasi dan Administrasi Pendidikan

Pemerintah memberikan tugas kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) sebagai organisasi penyelenggara administrasi pendidikan dan pengajaran di seluruh tanah air. Berikut tugas utama dari kementerian PP dan K adalah :

Pertama mengadakan pendidikan dan pengajaran di sekolah dari tingkat yang rendah (Sekolah Rakyat atau Sekolah Dasar) hingga pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi). Mengenai pendidikan taman kanak-kanak, kementerian memberikan bantuan terbatas pada alat-alat pelajaran dan tenaga pengajar. Sedangkan langsung tanggung jawab pemerintah. Kedua mengadakan pendidikan dan pengajaran bagi orang-orang dewasa diluar sekolah. Dan ketiga memelihara serta mengembangkan kebudayaan Indonesia sebagai dasar pendidikan di dalam maupun luar sekolah.

Perubahan Sekolah-sekolah

Setelah RIS kemabli menjadi kesatuan RI, pada tanggal 25 Agustus 1950 tepatnya di Yogyakarta kementerian PP dan K mengeluarkan keputusan tentang perubahan sekolah yang dilakukan di daerah-daerah RI. sejak tahun ajaran 1949/1950. Sekolah dibagi menjadi enam kelompok: model-model sekoah yang berasal pada era sebelum kembali kenegara kesatuan di bekas daerah-daerah kependudukan Belanda diubah dan disesuaikan dengan model pendidikan dan pengajaran nasional. Beberapa ketentuannya adalah sebagai berikut:

Sekolah Rakyat Negeri

Pertama, semua Sekolah Rakyat Negeri harus jadi sekolah yang luar biasa dengan bahasa pengantarnya adalah bahasa indonesia. Kedua, kelas pemulihan dibuka untuk murid-murid Sekolah Rakyat yang awalnya meenggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Ketiga, kelas pemulihan boleh menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dengan syarat bahwa secepat mungkin harus diperbaiki ke bahasa Indonesia lagi. Dan keempat, Pada kota-kota besar kelas-kelas pemulihan menjadi sekolah yang berdiri sendiri.

Sekolah rakyat Partikelir

Bersubsidi: Pertama, bahasa pengantar bahasa Indonesia. Kedua, harus menggunakan model pelajaran Sekolah Rakyat Negeri dan diperbolehkan menambah pelajaran lain asalkan mendapat persetujuan kemeterian PP dan K.

Tak bersubsidi: Pertama, bebas ingin menggunakan bahasa pengantar apa saja. Kedua bahasa Indonesia tetap mata pelajaran wajib. Ketiga, pemerintah memiliki hak pengawas.

Istimewa: Pertama, bahasa pengantar yang digunakan yaitu bahasa Belanda. Kedua, diperuntukkan anak-anak warga negara Belanda yang bekerja di pemerintah Indonesia. Ketiga, dari jumlah murid pemerintah dapat menentukan tunjangan murid. Keempat, diperbolehkan menerima anak-anak dari warga negara asing.

Pendidikan Islam

Pendidikan dasar Madrasah Ibtidayah enam tahun yang berupa bentuk formal dari lembaga pendidikan dasar yang diatur oleh Departemen Agama. Madrasah Tsanawiyah dibentuk pada tahun 1959 selama tiga tahun, dan di tahun 1966 dibuka pendidikan khusus perempuan yang memberikan model pendidikan Muallimat pada jenjang pendidikan selama enam tahun.

Departemen agama mulai melakukan rencana untuk memasukkan mata pelajaran umum di Madrasah yang dimulai pada tahun 1953. Hal ini ditandai dengan dibukannya Madrasah Menengah Pertama (MPP) di tahun 1956, dan disusul Madrasah Atas (MMA) di tahun 1959. Hal ini berbeda dengan Madrasah sebelumnya yaitu Madrasah Ibtidayah dan Madrasah Tsanawiyah karena struktur kurikulum MMP dan MMA ini 60% adalah pelajaran agama dan 40% adalah pelajaran umum.

Berbeda dengan Nahdalatul Wathan (NW) Lombok memberikan sistem pendidikan dalam tiga tingkat : pertama, tingkat Iljamiyah, yaitu tingkat pendahuluan. Yang dimana tingkat ini diberikan untuk anak-anak. Masa belajarnya adalah setahun. Yang kedua, tingkat Tahdliriyah, di tingkat ini ialah lanjutan dari Iljamiyah. Yang dimana mereka telah belajar di Iljamiyah atau mereka telah lulus dari sekolah formal setingkat SD. Masa belajar sekolah ini ialah 3 tahun. Ketiga, tingkat Ibtida'yyah, mereka berada disini merupakan murid yang lulus pada tingkat sebelumnya, Masa pendidikannya 4 tahun.

Ada juga Madrasah Muballighin dan Mubalilighat yang mulai dibuka pada tahun 1955/1956, sekolah ini disediakan hanya untuk mengasah para calon dai. Bukan hanya itu saja, masa belajar madrasah muallimin dan muallimat yang awalnya hanya empat tahun lalu ditingkatkan menjadi enam tahun.

PENUTUP

Kesimpulan dari uraian diatas yaitu sistem pendidikan di era awal kemerdekaan sampai orde lama ini diawali pasca Proklamasi Kemerdekaan yang diandaskan Pancasila dan juga falsafah negara. Pada sejarah pendidikan Indonesia di era awal kemerdekaan sampai orde lama bisa dilihat sesuai dengan peristiwa sejarah, yaitu Periode 1945-1950 dan Periode 1950-1966. Sistem pendidikan periode 1945-1950 tetap diteruskan seperti di zaman Jepang, sedangkan sistem pembelajaran umum tetap sama serta bahasa pengantar yang ditetapkan ialah bahasa Indonesia untuk sekolah. Tapi pemerintahan Indonesia memberlakukannya berbeda. Dimana di era ini ditetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak belajar dan bersekolah. Berbeda pada zaman Kolonial yang bisa belajar dan bersekolah hanya orang-orang tertentu.

DAFTAR PUSAKA

Djojonegoro, I. W. Lima Puluh Tahun. *Perkembangan Pendidikan Indonesia Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1996*

577 *Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama – Salsabiil Rihhadatul Aisy, Hudaidah*
DOI: <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.327>

Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 9(2), 157. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i2.4168>

García Reyes, L. E. (2013). Sisitem Pendidikan Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik Yogyakarta. Pustaka Pelajar.*

Hartono, Y. (2017). Pendidikan Nasional dan Kualitas Manusia Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7(2), 84. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v7i2.1491>

Hasbullah. (1999). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta Raja Grafindo Persada.*

Hasbuallah. (1996). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta Rajawali Pers.*

Helius, S. (1993). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*. Depdikbud. https://pustaka.kebudayaan.kemdikbud.go.id/index.php?p=show_detail&id=12393

Ismaun. (2005). *Pengantar belajar sejarah sebagai ilmu dan wahana pendidikan. Bandung : Historia Utama Perss.*

Nasution. (2011). *Sejarah Pendidikan Indonesia, Bandung: PT. Bumi Aksara.*

Samsul, Nizar. (2011). *Sejarah Pendidikan Islam Jakarta: Kencana Prenada Media Group.*

Supardan, D. (2008). Menyingkap Perkembangan Pendidkan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang : Perspektif Pendidikan Kritis. *Generasi Kampus, 1*(September), 97–99.

Syahrudin, & Susanto, H. (2019). Sejarah Pendidikan Indonesia. In *Program Studi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat* (Vol. 53, Issue 9).

Yamin, M. (2009). *Mengugat Pendidikan Indonesia. Yogyakarta Ar-Ruzz Media.*

Zulkarnain, Z. (2017). Filosofis Kurikulum Mata Pelajaran Sejarah Masa Orde Lama. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah, 1*(1), 57. <https://doi.org/10.17509/historia.v1i1.7011>

Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lam

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ Cahyo Dwi Andita, Desyandri Desyandri.

"Pengaruh Penggunaan Musik Terhadap Konsentrasi Belajar Anak Sekolah Dasar", EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN, 2019

Publication

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%